****

**RENCANA KERJA**

**(Renja)**

**DINAS PARIWISATA**

**KABUPATEN DEMAK**

**TAHUN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**DINAS PARIWISATA**

Jl. Sultan Patah No. 53 Demak

Telp./ Fax: (0291) 685530

Web : www.pariwisata.demakkab.go.id

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran dan kontribusi penting dalam Pembangunan Perekonomian Nasional maupun daerah/lokal. Kemajuan dan kesejahteraan ekonomi yang semakin tinggi telah menjadikan Pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia. Bahkan telah menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan dunia lainnya. Pergerakan jutaan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan dan menjadi industri jasa yang memberikan kotribusi penting bagi perekonomian dunia, perekonomian negara-negara lainnya hingga pada peningkatan kesejahteraan ekonomi di Tingkat masyarakat lokal khususnya masyarakat di Destinasi Pariwisata.

Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal khususnya masyarakat di destinasi pariwisata, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Berbagai perkembangan dan peristiwa dewasa ini membawa pengaruh besar pada perkembangan kepariwisataan, khususnya kepariwisataan daerah. Banyak potensi dan sekaligus permasalahan serta isu baru yang muncul ke permukaan yang membutuhkan cara penanganan dengan pendekatan-pendekatan yang spesifik. Dinamika tersebut perlu diakomodasikan ke dalam produk-produk rencana yang ada di daerah agar potensi, permasalahanserta isu-isu baru yang muncul dapat ditampung dan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta program.

Kabupaten Demak memiliki keragaman potensi wisata serta lokasi wilayah yang strategis yang dapat menjadi basis pengembangan kepariwisataan. Potensi wisata yang relatif cukup besar ini, perlu dikelola secara optimal dan terpadu. Daya tarik wisata perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai dan dikemas sebagai satu kesatuan produk wisata yang bisa dinikmati wisatawan dalam satu rangkaian perjalanan yang menyenangkan.

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selaku penyelengara dibidang pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana kerja atau yang lebih dikenal dengan sebutan renja adalah sebuahdokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangkaregulasi dan kerangka anggaran. Sesuai dengan koridor penyusunannya, RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan OrganisasiPerangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Penyusunan / perumusan rencana kerja dilakukan dengan dasar pengkajian yang terarah berorientasi kepada peningkatan kualitas layanan sesuai dengan bidang kerja sehinggga menghasilkan output program dan kegiatan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan.

Menindaklanjuti hal ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak selaku perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Demak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan dan pembangunan dibidang pariwisata berkewajiban melakukan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2021.Penyusunan Renja dilatarbelakangi dengan adanya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 yang memuat program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2021. Rencana Kerja ini mengacu pula kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2016-2021 yang berisikan visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 agar perencanaan pembangunan yang dilakukan dapat terintegrasi dengan rencana induk yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Demak sebelumnya dan berfungsi sebagai acuan bagi setiap OPD.

* 1. **Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak 2016 – 2021;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
28. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020;
29. Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
31. Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (e-Planning) dan Penganggaran Elektronik (e-Budgeting) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (e-Planning) dan Penganggaran Elektronik (e-Budgeting);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2021 disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2016-2021.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2016-2021 ;
2. Memberikan arah kebijakan secara berkesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Demak ;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam menyusun program/kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2021.
   1. **Sistematika Penulisan**

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematikan Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan

Capaian Renstra

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mewujudkan perencanaan dan pembangunan yang berkesinambungan agar tujuan RPJMD dapat tercapai, maka penyusunan rencana kerja sudah semestinya memperhatikan dan mempertimbangkan (evaluasi) pada pencapaian pada tahun – tahun sebelumnya. Secara spesifik, evaluasi terhadap rencana kerja tahun sebelumnya harus dilakukan terhadap tiga aspek utama ; (1) kebijakan perencanaan program dan kegiatan, (2) pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan (3) hasil rencana program dan kegiatan yang kemudian berakumulasi kepada penyusunan atau pengidentifikasian permasalahan yang dihadapi, analisis sumber daya yang dimiliki baik SDM maupun SDA, penetapan tujuan dan sasaran prioritas secara seksama dan kebijakan serta aturan pelaksanaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 tidak dapat terlepas dari analisis evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya. Pengurutan evaluasi ini merupakan satu bagian terintegrasi secara penuh dan tidak dapat dipisahkan mengingat sustainability chain (rantai kebersinambungan/ keberlajuntan) RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 tidak akan dapat terbentuk apabila salah satu komponen tersebut dihilangkan. Untuk itu, maka evaluasi pencapaian kinerja tersebut kemudian ditampilkan pada bentuk *Tabel Realisasi Program dan Kegiatan 2019* seperti berikut :

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | NAMA PROGRAM/ KEGIATAN | PAGU DANA (Rp.) | REALISASI | | KET |
| (Rp) | (%) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **BELANJA LANGSUNG** | **3,798,400,000** | **2,660,874,923** | 70.05 |  |
| **A** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | ***782.873.600*** | ***746.899.095*** | ***95,40*** |  |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat-menyurat | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00 | Selesai |
| 2 | Peny.Js.Kom.Sumber Daya Air dan Listrik | 75.000.000 | 52.324.055 | 69,77 | Selesai |
| 3 | Peny.Jasa Administrasi Keuangan | 39.900.000 | 39.200.000 | 98,25 | Selesai |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | 20.000.000 | 19.984.676 | 99,92 | Selesai |
| 5 | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | 34.000.000 | 33.781.950 | 99,36 | Selesai |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | 5.000.000 | 4.990.000 | 99,80 | Selesai |
| 7 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 8.000.000 | 7.979.200 | 99,74 | Selesai |
| 8 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan | 2.200.000 | 1.407.300 | 63,97 | Selesai |
| 9 | Penyediaan bahan Logistik kantor | 5.000.000 | 4.950.000 | 99,00 | Selesai |
| 10 | Penyediaan Makanan dan Minuman | 20.000.000 | 19.961.500 | 99,81 | Selesai |
| 11 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah | 100.000.000 | 99.820.678 | 99,82 | Selesai |
| 12 | Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS | 472.273.600 | 460.999.736 | 97,61 | Selesai |
| **B** | **Program PeningkatanSarpras Aparatur** | ***114.050.785*** | ***108.615.000*** | **95,23** |  |
| 13 | Pengadaan Perlengkapan gedung kantor | 40.000.000 | 35.350.000 | 88,38 | Selesai |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/ berkala gedung Kantor | 30.000.000 | 29.940.000 | 99,80 | Selesai |
| 15 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 34.050.785 | 33.905.000 | 99,57 | Selesai |
| 16 | Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10.000.000 | 9.420.000 | 94,20 | Selesai |
| **C** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | ***10.000.000*** | ***9.550.000*** | **95,50** |  |
| 17 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 10.000.000 | 9.550.000 | 95,50 | Selesai |
| **D** | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **189.908.315** | **189.776.618** | ***99,93*** |  |
| 18 | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | 15.900.000 | 15.897.000 | 99,98 | Selesai |
| 19 | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | 48.758.315 | 48.757.500 | 100,00 | Selesai |
| 20 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri | 125.250.000 | 125.122.118 | 99,90 | Selesai |
| **E** | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | ***3.613.010.000*** | ***2.711.010.173*** | ***75,03*** |  |
| 21 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | 1.859.342.000 | 1.816.633.173 | 97,70 | Selesai |
| 22 | Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan | 208.750.000 | 198.647.000 | 95,16 | Selesai |
| 23 | Pengembangan daerah tujuan wisata | 326.630.000 | - | - | Batal Dilaksanakan |
| 24 | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi | 1.048.288.000 | 550.310.000 | 52,50 | Selesai |
| 25 | Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan standarisasi (DBHCHT) | 170.000.000 | 145.420.000 | 85,54 | Selesai |
| **F** | **Program Pengembangan Kemitraan** | ***47.420.000*** | ***47.170.000*** | ***99,47*** |  |
| 26 | Pelaksanaan Koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | 41.420.000 | 41.420.000 | 100,00 | Selesai |
| 27 | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | 6.000.000 | 5.750.000 | 95,83 | Selesai |
|  |  |  |  |  |  |
|  | BELANJA TIDAK LANGSUNG |  |  |  |  |
| 28 | Belanja Pegawai | 2.361.641.000 | 2.257.749.260 | 95,60 | Selesai |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **JUMLAH** | **7.118.903.700** | **6.070.770.146** | **85,28** | **Selesai** |

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa hampir semua program dan kegiatan tahun 2019 secara keseluruhan dapat dilaksanakan. Kecuali ada 2 (dua) kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu :

* 1. Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata dengan sumber dana Silpa DAK Fisik Bidang Pariwisata, karena masuk di Anggaran Perubahan sehingga tidak bisa dilaknakan karena waktu kontrak tidak cukup.
  2. Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi, penyerapan masih rendah karena ada 2 (dua) pelatihan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan waktu kontrak tidak cukup.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.1 Rekapitulitas Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan** | | | | | | | | | | | | | |
| **Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020** | | | | | | | | | | | | | |
| **Kabupaten Demak** | | | | | | | | | | | | | |
| Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar : ……. |
| **Kode** | | | | **Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021** | **Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)** | | | **Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Rentra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 3 |  |  |  | Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02 |  |  | Pariwisata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | 02 | **1** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Terlayaninya administrasi perkantoran (bulan)** | **60** | **12** | **12** | **12** | **100** | **0** | **24** | **40** |
| 3 | 02 | 1 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Biaya meterai, perangko, surat tercatat, dan benda pos lainnya | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening telpon, PDAM, listrik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 07 | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan barang | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 10 | Penyediaan alat tulis kantor | Ketersediaan ATK | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 11 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak amplop, map, blanko, kertas kop, stiker, dan penggandaan | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 12 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pengadaan komponen listrik | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 13 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terjaganya kebersihan kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pembayaran langganan koran | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 16 | Penyediaan bahan logistik kantor | Tercukupinya Umubul2, bendera, dan tanaman hias kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 17 | Penyediaan makanan dan minuman | Pengadaan makan, minum rapat | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 18 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| 3 | 02 | 1 | 19 | Penyediaan Jasa pegawai non-PNS | Honor pegawai non-PNS | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 0 | 24 | 40 |
| **3** | **02** | **02** | **3** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh kegiatan kepariwisataan** | **60** | **12** | **12** | **12** | **100** | **12** | **36** | **60** |
| 3 | 02 | 02 | 07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 60 |
| 3 | 02 | 02 | 22 | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | Gedung kantor yang layak dan nyaman | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 60 |
| 3 | 02 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Pemeliharaan kendaraan dinas | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 60 |
| 3 | 02 | 02 | 28 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | Pemeliharaan peralatan elektronik, mesin ketik kantor | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 60 |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa surat menyurat | Biaya meterai, perangko, surat tercatat, dan benda pos lainnya |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | Pembayaran rekening telpon, PDAM, listrik |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan jasa administrasi keuangan | Terbayarnya honor bendahara pengeluaran dan barang |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan alat tulis kantor | Ketersediaan ATK |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Cetak amplop, map, blanko, kertas kop, stiker, dan penggandaan |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Pengadaan komponen listrik |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Terjaganya kebersihan kantor |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pembayaran langganan koran |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan bahan logistik kantor | Tercukupinya Umubul2, bendera, dan tanaman hias kantor |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan makanan dan minuman | Pengadaan makan, minum rapat |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Perjalanan dinas |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
|  |  |  |  | Penyediaan Jasa pegawai non-PNS | Honor pegawai non-PNS |  |  |  |  |  | 12 | 12 | #DIV/0! |
| **3** | **02** | **5** |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Peningkatan kwalitas SDM Bidang Pariwisata** | **60** | **12** | **12** | **12** | **100** | **12** | **36** | **60** |
| 3 | 02 | 5 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Mengikuti Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 60 | 12 | 12 | 12 | 100 | 12 | 36 | 60 |
| **3** | **02** | **15** |  | **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah Kunjungan Wisata** | **2.200.000** | **1.927.406** | **2.000.000** | **2.068.009** | **103** | **2.100.000** | **6.095.415** | **277** |
| **Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD** | **2.200.000.000** | **1.927.406.600** | **2.000.000.000** | **2.068.009.000** | **103** | **2.100.000.000** | **6.095.415.600** | **277** |
| 3 | 02 | 15 | 2 | Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata | Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 6 | 3 | 4 | 4 | 100 | 5 | 12 | 200 |
| 3 | 02 | 15 | 4 | Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | 105 | 102 | 102 | 213 | 209 | 104 | 419 | 399 |
| 3 | 02 | 15 | 5 | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Jumlah kunjungan Wisatawan | 90.000 | 10.000 | 10.000 | 140.602 | 1.406 | 10.000 | 160.602 | 178 |
| **3** | **02** | **16** |  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | **Jumlah Objek Wisata** | **8** | **6** | **6** | **7** | **117** | **7** | **20** | **250** |
| 3 | 02 | 16 | 2 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata | 8 | 3 | 5 | 5 | 100 | 6 | 14 | 175 |
| 3 | 02 | 16 | 3 | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 11 | 9 | 10 | 10 | 100 | 11 | 30 | 273 |
| 3 | 02 | 16 | 6 | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 50 |
| 3 | 02 | 16 | 7 | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi | Jumlah Kegiatan sosialisasi, pelatihan, Pembinaan pokdarwis, dan pemilihan duta wisata | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 9 | 300 |
| 3 | 02 | 16 | 8 | Pengembangan, Sosialisasi dan penerapan serta Pengawasan Standarisasi (DBHCHT) | Jumlah Kegiatan sosialisasi, pelatihan, Pembinaan pokdarwis, dan pemilihan duta wisata | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 300 |
| **3** | **02** | **##** |  | **Program Pengembangan Kemitraan** | **Meningkatnya kerjasama pengembangan pariwisata** | **5** | **5** | **5** | **5** | **100** | **5** | **15** | **300** |
| 3 | 02 | 17 | 05 | Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata | Jumlah kerjasama dibdang promosi melalui tampilan kesenian se wilayah Kedungsepur dan Pakudjembara | 5 | 5 | 4 | 5 | 125 | 4 | 14 | 280 |
| 3 | 02 | 17 | 09 | Monitoring, evaluasi, dan Pelaporan | Monitoring, Evaluasi kegiatan kepariwisataan dan pembuatan laporan | 6 | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 15 | 250 |

**2.2. Analisis Kinerja Pelayanan**

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar melakukan analisis kinerja pelayanan dengan tujuan untuk menghasilkan analisis kinerja yang lebih akurat berdasarkan pelaksanaan tiap kegiatannya. Selanjutnya, memperhatikan tugas dan kewenangan dinas selaku OPD Pemerintah Kabupaten Demak. sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan meliputi ;

1. Persentase meningkatnya kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara ;
2. Jumlah kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD ;
3. Rata-rata lama kunjungan Wisatawan.

Sedangkan IKK Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah :

1. Persentase pertumbuhan jumlah Wisatawan Mancanegara per Kebangsanaan ;
2. Persentase peningkatan perjalanan Wisatawan Nusantara yang datang ;
3. Tingkat hunian akomodasi ;
4. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap jumlah total PDRB ;
5. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap jumlah total PAD.

***Tabel***

***Indikator Kinerja Utama (IKU)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Sasaran RPJMD yang diacu | Sasaran Renstra Dinparta | Indikator Kinerja | Bidang Urusan | Penanggung Jawab | Target Tahun 2017 | Target Tahun 2018 | Target Tahun 2019 | Target Tahun 2020 | **Target Tahun 2021** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak | Presentase Meningkatnya kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegar | Bidang Promosi Pariwisata | Kabid Propar | 5% | 5% | 5% | 5% | **5%** |
| Jumlah kontribusi Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | 1,490,000,000 | 1,900,000,000 | 2,000,000,000 | 2,100,000,000 | **2,200,000,000** |
| 2 | Berkembangnya objek daya Tarik wisata dan tampilan kesenian dalam rangka kalender event | Rata-rata lama kunjungan wisatawan | Bidang Pengembangan ODTW dan EK | Kabid ODTW dan EK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |

**2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.**

1. Isu Internal
2. Lemahnya Koordinasi Lintas Sektoral

Sinergi lintas sektoral ini sangat berperan sekali dalam menentukan keberhasilan pencapaian visi mengingat bahwa pembangunan sektor pariwisata bukanlah pekerjaan satu dinas saja melainkan atas partisipasi aktif semua elemen. Namun disayangkan bahwa sinergi yang diharapkan belum dapat memberikan hasil maksimal. Keterbatasan ini bukan disebabkan semata oleh bagaimana program dan kegiatan itu dilaksanakan melainkan lebih karena kualitas sinergi kerjasama dan koordinasi lintas sektoral kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak masih jauh dari yang diharapkan.

Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antar pelaku pariwisata dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya meningkatkan program-program pembangunan kepariwisataan yang lebih terpadu dan terintegrasi menjadi prasyarat keberhasilan pembangunan kepariwisataan.

Pemerintah sebagai fasilitator dan pembina pembangunan memegang kunci untuk membuka keterpaduan pembangunan bidang Pariwisata, sehingga pihak swasta dan masyarakat akan berpartisifasi aktuf dalam pencapaian sasaran pembangunan di sektor pariwisata

1. Kondisi dan Kemempuan APBD

Upaya untuk membangun kepariwisataan daerah pada saat ini dihadapkan pada satu dilema, bahwa pada satu sisidiharapkan sektor pariwisata daerah akan mampu berperan sebagai sektor unggulan penyumbang devisa terbesar di tingkat nasional. Namun disisi lain kemitraan menjadi sektor pariwisata sebagai penghasil pendapatan asli daerah tidak di imbangi dengan penyedian angggaran yang memadai.

1. Isu Eksternal
2. Psikologis Wisatawan dan Perubahan Tren Pariwisata Global

Pariwisata tidak dapat dipungkiri lagi telah menjadi salah satu pilar utama dalam meningkatkan pendapatan baik negara (devisa) maupun daerah (PAD). Kebutuhan akan relaksasi pikiran melalui perjalanan wisata telah menjadi salah satu kebutuhan pokok tiap individu. Hanya saja, kebutuhan wisata yang diinginkan oleh tiap individu berbeda satu sama lainnya.

DI Kabupaten Demak memiliki beberapa opsi tempat wisata antara lain wisata religi, alam dan agro wisata. Tren pariwisata sekarang ini lebih cenderung ke lokasi yang

Di era millennium saat ini, dimana tren bisnis berkembang dan berubah dengan sangat pesat (luar biasa dinamis), pariwisata sebagai bagian dari bisnis yang menjanjikan turut pula mengalami perubahan pesat. Kalau dahulu, wisatawan hanya menginginkan kemudahan akses objek wisata dan jaminan keamanan maka pada saat ini, wisatawan sudah begitu menuntut akan ketersediaan fasilitas utama lainnya seperti ketersediaan jaringan internet, akses financial yang lengkap (mesin ATM universal), infrastruktur yang bukan hanya baik tetapi juga cepat, jasa transportasi, tempat makan, pusat cinderamata terpadu, dll yang begitu rumit namun sangat logis mengingat perjalanan mereka adalah perjalanan menuju daerah baru yang belum dikenal dengan baik oleh mereka. Selain hal tersebut, psikologis masyarakat daerah tujuan wisata turut pula menjadi pertimbangan utama bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata. Jaminan akan masyarakat yang ramah, ringan tangan dalam membantu, sopan tutur kata menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar-tawar.

Memperhatikan tuntutan diatas, maka daerah tujuan wisata sangat dituntut untuk tidak hanya menekankan pembangunan kepariwisataannya hanya pada pembangunan *hardware* semata melainkan harus pula mengutamakan pembangunan dan pengembangan  *softskills*. Pembangunan fisik dan manusia harus berjalan seimbang agar terbentuk equilibrium seperti yang diminta oleh para wisatawan.

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Promosi pariwisata adalah sebuah promosi multi dimensi karena yang dijual adalah jasa dan produk bukan salah satu saja. Oleh sebab itu diperlukan adanya konsep bauran pemasaran (*marketing mi-*) yang terintegrasi dan tidak hanya terpaku kepada konsep 4P semata *Product* (produk), *Price* (harga), *Place* (Tempat), dan *Promotion* (promosi) melainkan mesti pula mempertimbangkan keberadaan factor *People* (manusia), *Physical Evidence* (bukti fisik) dan *Process* (standardisasi proses). Kemudian sebagai pengelola potensi wisata, harus pula memperhatikan sudut pandang konsumen terhadap jasa dan produk yang ditawarkan. Patut untuk ditelaah lebih mendalam mengenai kebutuhan dan harapan wistawan (*customers’ needs and e-pectations*), biaya yang harus dikeluarkan (*cost*), kenyamanan ( *convenience*) dan kelancaran komunikasi.

Integrasi analisis sudut pandang penjual dan konsumen yang tercantum dengan baik didalam konsep 7P bauran pemasaran (*7P of Marketing Mi-*) kemudian dapat diterapkan kedalam penyusunan strategi promosi yang tentu saja menjadi tidak murah. Namun demikian, perkembangan dunia teknologi informasi saat ini telah sangat banyak menguntungkan promosi pariwisata. Mahalnya biaya promosi dapat ditekan sedemikian rupa melalui pembuatan website yang memuat semua informasi penting dan dapat diakses oleh siapa saja dan dimana saja diseluruh dunia. Bahkan tidak terbatas pada penyediaan website, pada saat ini situs-situs jejaring sosial telah banyak bermunculan dan menyediakan fasilitas gratis sehingga biaya promosi dapat semakin ditekan.

Memanfaatkan kondisi ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Demak telah membuat webside yang berisi tentang destinasi pariwisata, event pariwisata, jumlah kunjungan dll. Alamat web tersebut dapat di akses melalui alamat : [www.pariwisata.demakkab.go.id](http://www.pariwisata.demakkab.go.id). Selain melalui webside Dinas Pariwisata juga aktif dalam social media antara lain Instagram dan Facebook.

**2.4.Review Rancangan Awal**

Menimbang pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak dari tahun 2015 – 2016 serta proyeksi kegiatan tahun berjalan (2020) kemudian turut pula menimbang perkembangan tingkat kunjungan wisata lokal maupun mancanegara ke Kabupaten Demak sepanjang kurun waktu 4 tahun terakhir (2016-2019), maka pada formulasi program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 harus mampu untuk :

* 1. Optimalisasi peningkatan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok sadar wisata dan pelaku pariwisata dan kelompok kesenian;
  2. Meningkatkan kualitas pariwisata sehingga memiliki citra khas (*prominent value*);
  3. Membentuk kegiatan wisata baru dengan memanfaatkan potensi wisata yang belum tereksploitasi;
  4. Meningkatkan kunjungan wisatawan baik lokal, regional, nasional dan internasional;
  5. Membentuk tren baru yang dapat meningkatkan motivasi wisatawan untuk melakukan kunjungan ulang;
  6. Memperbanyak atraksi daya tarik wisata untuk meningkatkan durasi waktu tinggal (*stay-time-period*);
  7. Membentuk jaringan kerjasama dengan pengrajin cinderamata lokal dan pengusaha setempat untuk meningkatkan perbelanjaan wisatawan (*tourists’shopping e-penses*).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PEMETAAN NOMENKLATUR PROGRAM/KEGIATAN BERDASARKAN PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RENSTRA | | | | | | NOMENKLATUR PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019 | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF | KODE | | | | | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | INDIKATOR | TARGET CAPAIAN | PAGU INDIKATIF |
| **PILIHAN** | **PARIWISATA** |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  | **PILIHAN** | **PARIWISATA** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **3** | **26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Program pengembangan pemasaran pariwisata** | **Jumlah Kunjungan Wisata** | **2.200.000** | **1.025.760.000** | **3** | **26** | **03** |  |  |  |  | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah Kunjungan Wisata** |  |  |  | **2.200.000** | **925.000.000** |
|  |  | **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD** | **2.200.000.000** |  |  |  |  |  |  |  | **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD** |  |  |  | **2.200.000.000** |
|  |  | Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri | Jumlah kunjungan Wisatawan | 6 | 126.074.880 | **3** | **26** | **03** | **1.01** | **02** |  |  |  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah kunjungan Wisatawan | 90000 Orang | 201.200.000 |
|  |  | Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata | Tersedianya layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 105 | 81.285.120 | **3** | **26** | **03** | **1.02** | **03** |  |  |  | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 6 Media | 40.000.000 |
|  |  | Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata | Terciptanya kerjasama yang baik antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | 90.000 | 818.400.000 | **3** | **26** | **03** | **1.03** | **04** |  |  |  | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | 105 Lembaga | 33.800.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata** | Jumlah Objek Wisata | **8** | **2.675.248.000** | **3** | **26** | **02** |  |  |  |  | **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata** | **Jumlah Objek Wisata** |  |  |  | **8 Objek** | **780.058.400** |
|  |  |  |  | **Jumlah tampilan kesenian dalam kalender event** |  |  |  | **11 Kegiatan** |
|  |  | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata | Tersedianya Sarpras Pariwisata yang Representatif | 8 | 622.080.000 | **3** | **26** | **02** | **1.02** | **04** |  |  |  | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata | 8 Objek | 409.733.400 |
|  |  | Pengembangan Daerah Tujuan Wisata | Pengembangan Objek Wisata Yang Sudah Ada dan Pembangunan Objek Wisata Baru | 2 | - | **3** | **26** | **02** | **1.03** | **03** |  |  |  |  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 1 Objek | - |
|  |  | Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan | Terselenggaranya Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 11 | 1.368.880.000 | **3** | **26** | **02** | **1.01** | **03** |  |  |  |  | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 11 Kegiatan | 370.325.000 |
|  |  | Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi | Terlaksananya Kegiatan sosialisasi, pelatihan, Pembinaan pokdarwis, dan pemilihan duta wisata | 3 | 684.288.000 | **3** | **26** | **05** |  |  |  |  | **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** | **Presentase Terlaksananya Kegiatan sosialisasi, pelatihan, Pembinaan pokdarwis, dan pemilihan duta wisata** |  |  |  | **100%** | **138.318.000** |
|  |  | **3** | **26** | **05** | **1.01** | **02** |  |  |  | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan dan Pelaku usaha yang bersertifikasi | 7 Kegiatan | 138.318.000 |
|  |  | **3** | **26** | **05** | **1.01** | **02** |  |  |  | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata | Jumlah Desa Wisata dan Pokdarwis | 28 Deswita dan 28 Pokdarwis | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Program Pengembangan Kemitraan** | **Jumlah event bersama sewilayah Kedungsepur dan Pakudjembara** | **5** | **435.456.000** | **3** | **26** | **03** |  |  |  |  | **Program Pemasaran Pariwisata** | **Jumlah Kunjungan Wisata** |  |  |  | **2.200.000** | **925.000.000** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD** |  |  |  | **2.200.000.000** |
|  |  | Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata | Terrealisasinya kerjasama dibdang promosi melalui tampilan kesenian se wilayah Kedungsepur dan Pakudjembara | 5 | 311.040.000 | **3** | **26** | **03** | **1.01** | **04** |  |  |  |  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Jumlah Tampilan Kesenian dalam rangka kerjasama se wilayah Kedungsepur dan Pakudjembara | 105 Lembaga | 33.800.000 |
|  |  | Monitoring, evaluasi dan pelaporan | Monitoring, Evaluasi Kegiatan Kepariwisataan dan Pembuatan Laporan | 5 | 124.416.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Pembangunan di bidang Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pariwisata tidak dapat disanggah lagi merupakan suatu pekerjaan berat yang mencakup semua aspek baik kedinasan maupun non kedinasan. Kerjasama lintas sektoral antar lembaga kepemerintahan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh hasil sesuai harapan. Pekerjaan berat ini tidaklah lebih berat daripada membangun kesadaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat yang memegang peranan penting dalam kepariwisataan mengingat masyarakat merupakan bagian tidak terpisahkan dan merupakan elemen yang bersinggungan langsung dengan wisatawan.

Menindaklanjuti kondisi demikian, maka pemerintah melalui dinas terkait harus betul – betul dapat bersikap cerdik dan arif dalam membangun kelompok masyarakat yang sadar wisata dan mampu berperan aktif sehingga dapat menyumbang promosi wisata dan kegiatannya di lapangan. Dalam hal ini dengan memperhatikan psikologis masyarakat Kabupaten Demak, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Demak menyusun program dan kegiatan kerja Tahun Anggaran 2021 yang berorientasi kepada pembangunan komunitas masyarakat sadar wisata melalui pelatihan – pelatihan terpadu yang melibatkan pihak – pihak terkait dan diberikan kepada masyarakat secara langsung, juga diberikan pula kepada para peserta didik dan pelaku usaha kepariwiastaan. Pemberian pelatihan dengan sasaran multi level ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dari usia dini sehingga pada tahun-tahun yang akan datang masyarakat Kabupaten Demak dapat bertransformasi menjadi satu kekuatan baru yang solid dalam memajukan kepariwisataan daerah. Selain itu, penyelenggaraan event – event wisata yang melibatkan unsur masyarakat secara langsung juga turut dilakukan. Hal ini dimaksud untuk memotivasi masyarakat agar mau berdiri bersama pemerintah dalam memajukan kepariwisataan kota sekaligus membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

Hubungan kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata menjadi salah satu permasalahan utama yang perlu segera ditindaklanjuti, baik dari sisi Pendapatan Daerah, pembangunan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana pendukung pariwisata.

Terlampir kami sampaikan usulan dari pemangku kepentingan untuk bidang Pariwisata dari Pokkir sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.5** | | | | | |
| **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021** | | | | | |
| **Kabupaten Demak** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah: Dinas Pariwisata | | | |  |  |
| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Ds. Bungo | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 50.000.000 | - |
|  | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Demak | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 891.000.000 | - |
|  | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA |  |  |  |  |
|  | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Kab. Demak | Jumlah kunjungan Wisatawan | 650.000.000 | - |

**BAB III**

**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. **Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu mengacu kepada Rencana Induk yang lebih tinggi dalam lingkup Nasional, yaitu Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS; PP No. 50 Tahun 2011) maupun kebijakan pembangunan lainnya yang terkait dengan kepariwisataan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisaan Nasional tahun 2010-2025 kebijakan pembangunan kepariwisataan nasional adalah sebagai berikut:

1. Destinasi Pariwisata
2. Pemasaran Pariwisata
3. Industri Pariwisata
4. Kelembagaan Kepariwisataan

Visi pembangunan kepariwisataan Nasional adalah “**Terwujud Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat”**. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional terdapat empat misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan :

1. Destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat.
2. Pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
3. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
4. Kelembagaan kepariwisataan merupakan organisasi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efesien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan kepariwisataan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata.
2. Mengkomunikasikan destinasi pariwisata indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efesien dan bertanggungjawab.
3. Mewujudkan industry pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.
4. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Adapun sasaran Pembangunan Kepariwisataan Nasional adalah sebagai berikut :

1. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
2. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
3. Jumlah penerimaan devisa dan wisatawan mancanegara
4. Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara.
5. Produk Domistik Bruto di bidang Pariwisata.

Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Demak tidak dapat melepaskan diri dari perencanaan induk yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Periode 2016 – 2021 menyesuaikan dengan program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia Periode 2015 -2019. Adapun arah tujuan pembangunan pariwisata seperti yang telah tertuang di dalam Strategi dan Kebijakan Umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Periode Tahun 2016-2021 yaitu :

* 1. Meningkatkan daya saing pariwisata melalui pembukaan destinasi baru, peningkatan promosi pariwisata, memperkuat kelompok sadar wisata, dan meningkatkan frekuensi dan kualitas event-event pariwisata.
  2. Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan kontribusi pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pengembangan destinasi baru.
  3. **Tujuan dan Sasaran Renja**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan Visi dan Misi Bupati Demak serta didasarkan pada RPJMD 2016-2021, isue strategis dan analisis strategis, yang mengarah pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi.

Tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih yang sebagai acuan Dinas Pariwisata adalah :

Tujuan :

Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan

Sasaran :

Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih sebagaimana tersebut, adalah :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tujuan | : | Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD |
|  | Sasaran 1 | : | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak. |
|  | Sasaran 2 | : | Berkembangnya objek daya Tarik wisata dan tampilan kesenian dalam rangka kalender event |

**TUJUAN DAN SASARAN**

**DINAS PARIWISATA TAHUN 2021**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran pada tahun |
| 2021 |
|  | Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Pariwisata dalam PAD | Persentase Peningkatan Kontribusi Pendapatan Dari Sektor Pariwisata |  |  | % | 5 |
|  | Rata-rata lama kunjungan wisatawan |  |  | Jam | 4 |
|  |  |  | Meningkatnya jumlah kunjungan wisata dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD di Kabupaten Demak | Persentase Meningkatnya kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara | % | 5 |
|  |  |  | Jumlah kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD | PAD | 2,200,000,000 |
| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran pada tahun |
| 2021 |
|  |  |  | Berkembangnya objek daya Tarik wisata dan tampilan kesenian dalam rangka kalender event | Rata-rata lama kunjungan wisatawan | Jam | 4 |
|  |  |  |
|  |  |  |

* 1. **Program dan Kegiatan**

Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran strategi yang akan dicapai, maka program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:**
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
6. Penyediaan Jasa Surat menyurat.
7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
8. Penyediaan jasa administrasi keuangan
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
11. Penyediaan Komponen, Instalasi Listrik / penerangan Bangunan Kantor.
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
13. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan.
14. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15. Penyediaan Makanan dan Minuman.
16. Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
17. Penyediaan jasa pegawai non PNS
18. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan:** 
    1. Pendidikan dan pelatihan formal
19. **Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan:**
20. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri
21. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata
22. Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata
23. **Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dengan kegiatan:**
24. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata
25. Pengembangan Jenis dan Paket Wisata Unggulan
26. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
27. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi
28. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Serta Pengawasan Standarisasi (DBHCHT)

Adapun program dan kegiatan kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak beserta pagu kegiatannya dapat dilihat pada tabel usulan program dan kegiatan berikut ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabel 4. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 | | | | | | | | | |
| dan Prakiraan Maju Tahun 2022 | | | | | | | | | |
| Kabupaten Demak | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Lembar .......... Dari ........... | | |  |  |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan | Rencana Tahun 2021 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022 | |
| Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2.1 | DINAS PARIWISATA |  |  |  | 7.288.709.802 |  |  |  | 8.746.451.762 |
| 0,0 | URUSAN NON BIDANG |  |  |  | 4.549.333.402 |  |  |  | 5.459.200.082 |
| 1 | DINAS PARIWISATA |  |  |  | 4.549.333.402 |  |  |  | 5.459.200.082 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Dinas Pariwisata | 100,0 % | 4.549.333.402 | APBD | - | 100,0 % | 5.459.200.082 |
| 201 | Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat dan tertib administrasi | 1.0 Tahun | 18.000.000 | APBD | - | 1.0 Tahun | 21.600.000 |
| 1 | Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah | Penyusunan Renstra dan Renja OPD | 2.0 Dokumen | 4.000.000 | APBD | - | 2.0 Dokumen | 4.800.000 |
| 1 | Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 2 Dokumen | 4.000.000 | APBD | - | 2 Dokumen | 4.800.000 |
| 2 | Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan | Penyusunan Program dan Kegiatan OPD | 1.0 Dokumen | 2.000.000 | APBD | - | 1.0 Dokumen | 2.400.000 |
| 1 | Penyusunan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Dokumen | 2.000.000 | APBD | - | 1 Dokumen | 2.400.000 |
| 3 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Evaluasi OPD | 1.0 Dokumen | 2.000.000 | APBD | - | 1.0 Dokumen | 2.400.000 |
| 1 | Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 dokumen | 2.000.000 | APBD | - | 1 dokumen | 2.400.000 |
| 4 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan OPD | 1.0 Tahun | 5.000.000 | APBD | - | 1.0 Tahun | 6.000.000 |
| 1 | Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 5.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 6.000.000 |
| 5 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja OPD | 1.0 Tahun | 5.000.000 | APBD | - | 1.0 Tahun | 6.000.000 |
| 1 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 5.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 6.000.000 |
| 202 | Administrasi Keuangan | Tersediannya sarana dan prasarana perkantoran pada tahun anggaran | 1.0 Tahun | 3.640.114.801 | APBD | - | 1.0 Tahun | 4.368.137.761 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | 0,0 | 3.217.341.201 | APBD | - | 0,0 | 3.860.809.441 |
| 1 | Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 2.943.974.000 | APBD | - | 1 Tahun | 3.532.768.800 |
| 2 | Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi Daerah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 12 Bulan | 208.367.201 | APBD | - | 12 Bulan | 250.040.641 |
| 3 | Bagi Hasil | Lainnya | 1 Tahun | 65.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 78.000.000 |
| 2 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | 0,0 | 416.773.600 | APBD | - | 0,0 | 500.128.320 |
| 1 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 416.773.600 | APBD | - | 1 Tahun | 500.128.320 |
| 6 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | 0,0 | 2.000.000 | APBD | - | 0,0 | 2.400.000 |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 4 Dokumen | 2.000.000 | APBD | - | 4 Dokumen | 2.400.000 |
| 8 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran |  | 0,0 | 2.000.000 | APBD | - | 0,0 | 2.400.000 |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 5 Dokumen | 2.000.000 | APBD | - | 5 Dokumen | 2.400.000 |
| 9 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun |  | 0,0 | 2.000.000 | APBD | - | 0,0 | 2.400.000 |
| 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 2.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 2.400.000 |
| 203 | Administrasi Umum | Presentase terlayaninya administrasi perkantoran | 100,0 % | 841.218.601 | APBD | - | 100,0 % | 1.009.462.321 |
| 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah materai 3000 dan 6000 dan perangko yang terbeli | 550.0 Lembar | 2.550.000 | APBD | - | 550.0 Lembar | 3.060.000 |
| 1 | Pembelanjaan Kebutuhan Surat Menyurat | Lainnya | 650 Lembar | 2.550.000 | APBD | - | 650 Lembar | 3.060.000 |
| 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah rekening yang terbayar | 48.0 Rekening | 93.500.000 | APBD | - | 48.0 Rekening | 112.200.000 |
| 1 | Pembayaran Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Lainnya | 48 Rekening | 93.500.000 | APBD | - | 48 Rekening | 112.200.000 |
| 7 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah penerima honor administrasi keuangan | 10.0 Orang | 74.600.000 | APBD | - | 10.0 Orang | 89.520.000 |
| 1 | Honorarium/Upah Bulanan | Lainnya | 10 Orang | 74.600.000 | APBD | - | 10 Orang | 89.520.000 |
| 10 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah penyediaan alat tulis kantor | 30.0 Jenis | 29.056.470 | APBD | - | 30.0 Jenis | 34.867.764 |
| 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | Lainnya | 30 Jenis | 29.056.470 | APBD | - | 30 Jenis | 34.867.764 |
| 11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah penyediann barang cetakan dan penggandaan | 6.0 Paket | 14.950.000 | APBD | - | 6.0 Paket | 17.940.000 |
| 1 | Jumlah mmt, cetak, foto copy dan penjilidan | Lainnya | 6 Paket | 14.950.000 | APBD | - | 6 Paket | 17.940.000 |
| 12 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan | 15.0 Jenis | 10.000.000 | APBD | - | 15.0 Jenis | 12.000.000 |
| 1 | Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan yang terbeli | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 15 Jenis | 10.000.000 | APBD | - | 15 Jenis | 12.000.000 |
| 13 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor yang memadahi | 25.0 Jenis | 32.419.800 | APBD | - | 25.0 Jenis | 38.903.760 |
| 1 | Jumlah peralatan kebersihan dan perlengkapan kantor yang tersedia | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 25 Jenis | 32.419.800 | APBD | - | 25 Jenis | 38.903.760 |
| 14 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10.0 Jenis | 5.000.000 | APBD | - | 10.0 Jenis | 6.000.000 |
| 1 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 5.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 6.000.000 |
| 15 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah buku/ majalah yang terbaca | 2.0 Jenis | 1.000.000 | APBD | - | 2.0 Jenis | 1.200.000 |
| 1 | Pembelanjaan surat kabar, majalah dan buku-buku kepariwisataan | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 2 Jenis | 1.000.000 | APBD | - | 2 Jenis | 1.200.000 |
| 16 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul tercukupi | 3.0 Jenis | 6.000.000 | APBD | - | 3.0 Jenis | 7.200.000 |
| 1 | Pembelanjaan bibit tanaman, bendera dan umbul-umbul | Lainnya | 3 Jenis | 6.000.000 | APBD | - | 3 Jenis | 7.200.000 |
| 17 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makan minum rapat, tamu dan harian | 50.0 Kali | 83.460.000 | APBD | - | 50.0 Kali | 100.152.000 |
| 1 | Belanja makanan dan minuman | Lainnya | 1 Tahun | 83.460.000 | APBD | - | 1 Tahun | 100.152.000 |
| 18 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | Jumlah pegawai PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas | 59.0 Orang | 117.500.000 | APBD | - | 59.0 Orang | 141.000.000 |
| 1 | Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 12 Tahun | 117.500.000 | APBD | - | 12 Tahun | 141.000.000 |
| 22 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Komputer, Laptop, Kursi, Meja, Penyedot debu, Penghancur kertas dan gorden yang diperlukan | 68.0 Unit | 102.996.880 | APBD | - | 68.0 Unit | 123.596.256 |
| 2 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 13 Paket | 102.996.880 | APBD | - | 13 Paket | 123.596.256 |
| 28 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah ruangan / bagian gedung yang akan direhap | 2.0 Gedung | 117.085.451 | APBD | - | 2.0 Gedung | 140.502.541 |
| 1 | Belanja rehabilitas gedung dan bangunan | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 2 Lokasi/ Gedung | 117.085.451 | APBD | - | 2 Lokasi/ Gedung | 140.502.541 |
| 30 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas (mobil) yang terawat | 3.0 Mobil | 126.100.000 | APBD | - | 3.0 Mobil | 151.320.000 |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasiona | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 3 Mobil | 126.100.000 | APBD | - | 3 Mobil | 151.320.000 |
| 32 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor | 1.0 Unit | 10.000.000 | APBD | - | 1.0 Unit | 12.000.000 |
| 1 | Pemeliharaan Kereta Kencana | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 10.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 12.000.000 |
| 34 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah AC, komputer, laptop, printer, dll yang akan di servis | 10.0 Unit | 15.000.000 | APBD | - | 10.0 Unit | 18.000.000 |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 15.000.000 | APBD | - | 1 Tahun | 18.000.000 |
| 204 | Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Presentase ASN yang Disiplin dan mengikuti bintek | 100,0 % | 50.000.000 | APBD | - | 100,0 % | 60.000.000 |
| 1 | Pengadaan Mesin/Kartu Absensi | Jumlah mesin absensi yang dibutuhkan | 1.0 Unit | 2.000.000 | APBD | - | 1.0 Unit | 2.400.000 |
| 1 | Pengadaan Mesin finger print | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Paket | 2.000.000 | APBD | - | 1 Paket | 2.400.000 |
| 2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya | 60.0 Stel | 24.000.000 | APBD | - | 60.0 Stel | 28.800.000 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 60 Stel | 24.000.000 | APBD | - | 60 Stel | 28.800.000 |
| 3 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Jumlah pakaian lapangan | 60.0 Stel | 24.000.000 | APBD | - | 60.0 Stel | 28.800.000 |
| 1 | Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 60 Stel | 24.000.000 | APBD | - | 60 Stel | 28.800.000 |
| 9 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah ASN yang mengikuti bintek / pelatihan | 59.0 Orang | 0 | APBD | - | 59.0 Orang | - |
| 1 | Pendidikan Dan Pelatihan Formal | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 2 Paket | 0 | APBD | - | 2 Paket | - |
| 3,26 | URUSAN PARIWISATA |  |  | 2.739.376.400 | APBD | - |  | 3.287.251.680 |
| 1 | DINAS PARIWISATA |  |  | 2.739.376.400 | APBD | - |  | 3.287.251.680 |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Jumlah Objek Wisata | 8.0 Objek | 1.676.058.400 | APBD | - | 8.0 Objek | 2.011.270.080 |
| Jumlah tampilan kesenian dalam kalender event | 12.0 Event | APBD | - | 12.0 Event | - |
| 201 | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 12.0 Objek | 409.733.400 | APBD | - | 12.0 Objek | 491.680.080 |
| 3 | Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | Jumlah Event Pariwisata sebagai Paket Wisata Unggulan | 12.0 Event | 409.733.400 | APBD | - | 12.0 Event | 491.680.080 |
| 1 | Kirab Budaya | Lainnya | 1 Event | 33.545.000 | APBD | - | 1 Event | 40.254.000 |
| 2 | Megengan | Lainnya | 1 Event | 15.653.400 | APBD | - | 1 Event | 18.784.080 |
| 3 | Syawalan | Lainnya | 1 Event | 19.475.000 | APBD | - | 1 Event | 23.370.000 |
| 4 | Grebeg Besar | Lainnya | 2 Event | 194.045.000 | APBD | - | 2 Event | 232.854.000 |
| 5 | Karnaval | Lainnya | 1 Event | 35.425.000 | APBD | - | 1 Event | 42.510.000 |
| 6 | Even Lainnya | Lainnya | 5 Event | 52.840.000 | APBD | - | 5 Event | 63.408.000 |
| 8 | TMII | Lainnya | 1 Event | 8.750.000 | APBD | - | 1 Event | 10.500.000 |
| 9 | Hibah Pengembangan daya tarik wisata "Syawalan" di Desa Bungo Kecamatan Wedung Demak | Lainnya | 1 paket | 50.000.000 | APBD | - | 1 paket | 60.000.000 |
| 202 | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata | 8.0 Objek | 375.325.000 | APBD | - | 8.0 Objek | 450.390.000 |
| 4 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Destinasi Pariwisata | 8.0 Objek | 375.325.000 | APBD | - | 8.0 Objek | 450.390.000 |
| 1 | Makan Minum Harian Pegawai | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 1.625.000 | APBD | - | 1 Tahun | 1.950.000 |
| 2 | Perjalanan Dinas | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Tahun | 12.700.000 | APBD | - | 1 Tahun | 15.240.000 |
| 3 | Pengadaan Pagar Pembatas di Tembiring | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Paket | 150.000.000 | APBD | - | 1 Paket | 180.000.000 |
| 4 | Pemeliharaan Kendaraan Roda 3 | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Paket | 11.000.000 | APBD | - | 1 Paket | 13.200.000 |
| 6 | Pengadaan Tempat Cuci Tangan dan tempat sampah di Objek Daya Tarik Wisata | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 Paket | 200.000.000 | DBHCHT | - | 1 Paket | 240.000.000 |
| 203 | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 1.0 Objek | 891.000.000 | APBD | - | 1.0 Objek | 1.069.200.000 |
| 3 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Daya Tarik Wisata | 1.0 Objek | 891.000.000 | APBD | - | 1.0 Objek | 1.069.200.000 |
| 1 | Pembangunan Gasebo | Infrastruktur Lainnya | 1 Paket | 0 | APBD | - | 1 Paket | - |
| 2 | Pembangunan kamar mandi, tempat selfi, tempat duduk santai, dan tempat sampah | Infrastruktur Lainnya | 1 Paket | 0 | APBD | - | 1 Paket | - |
| 3 | Pembangunan Desa Wisata Boyolali, Kec. Gajah | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 paket | 391.000.000 | APBD | - | 1 paket | 469.200.000 |
| 7 | Feasibility Studi Tentang Penataan Pariwisata Religi Di Kabupaten Demak | Lainnya | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 8 | Perencanaan Pembangunan Terminal Wisata Kadilangu Demak | Lainnya | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 9 | Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Desa Surodadi Kecamatan Sayung Demak | Lainnya | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 10 | Rencana Aksi Daerah (RAD) Sektor Pariwisata Untuk Menunjang Pendapatan Daerah Kabupaten Demak | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 11 | Riset Potensi Daerah (RISPODA) Optimalisasi Retribusi Sektor Priwisata | Lainnya | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Jumlah Kunjungan Wisata | 2.300.000 Orang | 925.000.000 | APBD | - | 2.300.000 Orang | 1.110.000.000 |
| Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD | 2.300.000.000 PAD | APBD | - | 2.300.000.000 PAD | - |
| 201 | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan Wisatawan | 90000.0 Orang | 925.000.000 | APBD | - | 90000.0 Orang | 1.110.000.000 |
| Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 6.0 Media | APBD | - | 6.0 Media | - |
| Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | 105.0 Lembaga | APBD | - | 105.0 Lembaga | - |
| 2 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah kunjungan Wisatawan | 90000.0 Orang | 701.200.000 | APBD | - | 90000.0 Orang | 841.440.000 |
| 1 | Pelaksanaan Promosi Pariwisata | Lainnya | 1 Tahun | 201.200.000 | APBD | - | 1 Tahun | 241.440.000 |
| 2 | Kegiatan Wisata Pentas Seni Budaya Lokal kabupaten Demak | Lainnya | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 3 | Promosi Wisata Lokal Karnaval Megengan Kabupaten Demak | Lainnya | 1 paket | 150.000.000 | APBD | - | 1 paket | 180.000.000 |
| 4 | Pembuatan Wisata Desa Pelangi Dukuh Tambak Tengah Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Demak | Lainnya | 1 paket | 150.000.000 | APBD | - | 1 paket | 180.000.000 |
| 5 | Perencanaan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tambak Bulusan Karangtengah Demak | Lainnya | 1 paket | 100.000.000 | APBD | - | 1 paket | 120.000.000 |
| 3 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri | Jumlah layanan promosi pariwisata melalui media teknologi informasi | 6.0 Media | 40.000.000 | APBD | - | 6.0 Media | 48.000.000 |
| 1 | Penyediaan bahan informasi dan promosi melalui media | Lainnya | 6 Media | 40.000.000 | APBD | - | 6 Media | 48.000.000 |
| 4 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri | Jumlah kerjasama antara pemerintah, Swasta, Pelaku Usaha Pariwisata dan Organisasi Kepariwisataan | 105.0 Lembaga | 183.800.000 | APBD | - | 105.0 Lembaga | 220.560.000 |
| 1 | koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata | Lainnya | 105 Lembaga | 33.800.000 | APBD | - | 105 Lembaga | 40.560.000 |
| 2 | Feasibility Study Pengembangan Budaya dan Wisata Sekaten di Kabupaten Demak | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 paket | 150.000.000 | APBD | - | 1 paket | 180.000.000 |
| 5 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Presentase Terlaksananya Kegiatan sosialisasi, pelatihan, Pembinaan pokdarwis, dan pemilihan duta wisata | 100,0 % | 138.318.000 | APBD | - | 100,0 % | 165.981.600 |
| 201 | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan dan pelaku usaha yang bersetifikat serta Desa Wisata | 7.0 Kegiatan | 138.318.000 | APBD | - | 7.0 Kegiatan | 165.981.600 |
| 6 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah Peserta Duta Wisata, SDM Kepariwisataan dan pelaku usaha yang bersetifikat | 7.0 Kegiatan | 138.318.000 | APBD | - | 7.0 Kegiatan | 165.981.600 |
| 1 | Penyelengaraan Duta Wisata Tingkat Kabupaten | Lainnya | 60 Peserta | 100.448.000 | APBD | - | 60 Peserta | 120.537.600 |
| 4 | Pembinaan Pelaku Usaha Pariwisata | Lainnya | 40 Peserta | 10.470.000 | APBD | - | 40 Peserta | 12.564.000 |
| 5 | Uji Kompetensi Sertifikasi Pelaku Uspar dan Ekraf | Lainnya | 5 Peserta | 4.250.000 | APBD | - | 5 Peserta | 5.100.000 |
| 6 | perjalanan dinas | Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas | 1 tahun | 23.150.000 | APBD | - | 1 tahun | 27.780.000 |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Dinas Pariwisata Kabupaten Demak merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Demak yang harus menyusun Rencana Kerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Demak. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak untuk periode satu tahun. Rencana kerja ini merupakan acuan untuk Dinas Pariwisata Kabupaten Demak sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 sekaligus sebagai ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demaktahun 2021 ini juga sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan kinerja SKPD dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Demak Tahun 2021.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021 dapat diimplementasikan secara optimal apabila didukung kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan internal dan eksternal. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Kerja DinasPariwisata Kabupaten Demaktahun 2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja seluruh personil di Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.

Dinas Pariwisata kabupaten Demak sebagai Organisasi Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang kepariwisataan mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pariwisata pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien .

* 1. **Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja**

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

* Kurangnya SDM Pariwisata yang sesuai dengan Tingkat Pendidikan.
* Kurangnya pengetahuan pengelola objek wisata dan Daya tarik wisata, Pramuwisata, pelaku usaha Pariwisata dan pemandu wisata dilingkungan objek wisata tentang pelayanan prima kepada pengunjung dengan harapan pengunjung akan betah sehingga lama berkunjung lebih lama dan akan berkunjung lagi ke Kabupaten Demak ;
* Belum seluruhnya pelaku usaha pariwisata yang bersertifikasi, di Kabupaten Demak baru ada 2 (dua) orang.

**Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut**:

* Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM tentang pelatihan , serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM Aparatur, pengelola Objek dan Daya Tarik Wisata, Pramuwisata, para pelaku usaha pariwisata lainnya, melalui Pelatihan SDM Pelaku Pariwisata, Pelatihan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan.
* Mengadakan Pelatihan kepada pengelola objek wisata dan Daya tarik wisata, Pramuwisata, pelaku usaha Pariwisata dan pemandu wisata dilingkungan objek wisata tentang pelayanan prima kepada pengunjung dengan harapan pengunjung akan betah sehingga lama berkunjung lebih lama dan akan berkunjung lagi ke Kabupaten Demak ;
* Mengikutsertakan pelaku usaha pariwisata untuk mengikuti pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi standart Nasional.
  1. **Strategi Pemecahan Masalah**

Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah :

* Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola objek dan daya tarik wisata serta stake holder terkait melalui Pelatihan SDM Pelaku Pariwisata, Pelatihan Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Kepariwisataan;
* Mengoptimalkan program-program dan kegiatan yang telah dialokasikan anggaran melalui APBD Kabupaten Demak maupun anggaran dari Pusat;
* Meningkatkan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan
* Meningkatkan pembangunan sarana prasarana Objek Daya Tarik Wisata.
* Meningkatkan mutu pelayanan dan jumlah kunjungan, lama kunjungan dan pengeluaran belanja wisatawan ;
* Meningkatnya tampilan kesenian dalam rangka kalender event.
* Meningkatkan kerjasama dibidang promosi melalui tampailan kesenian.
* Meningkatkan promosi pariwisata melalui Website, Facebox, Instagram, Youtube, Brosure, Sipartali, Leaflet.

Demikian Rancangan Akhir Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Demak Tahun 2021, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Demak, 17 Juli 2020

KEPALA DINAS PARIWISATA

KABUPATEN DEMAK

AGUS KRIYANTO, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19690810 199703 1 006